Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Magetan

Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si
KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

YOGIK ERDAWILIS C, S.H.
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ELIYAH, S.H.
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

FERDY HARLASTIKO, Sos.
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Drs. PARLAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

-
SEKRETARIS

HANDRY IRAWAN, S.H.
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HENDRA KURNIAWAN
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

MOCH AFFANDI, S.Sos.
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

ANANG SETYA K, S.E.
PERENCANA AHLI MUDA

UMIATUN
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

MISTININGSIH
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

CHOIRUR ROJIKIN, S.E.
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

SONY ARSONO W
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

-
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

DANANG RIHDO SUBEKTI, S.AP.
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

SRIYANTO
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DANDUN WIDYA K, S.STP., MM
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

HESTY NUR PRATIWI, S.E.
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

SUNARYO
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

WINARSIH
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

ZAINI SURYONO, S.STP.
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SETIYO BUDI, S.H.
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DONNY DESTHYA WA, S.AP.
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

SAFIRA HERAWATI, S.Sos.
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Magetan

DATA PEGAWAI
BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS

NO	NAMA	JABATAN
1	ZAINI SURYONO, S.STP	KEPALA BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS
2	YOGIK ERDAWILIS, C, S.H	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
3	SETIYO BUDI, S.H	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
4	DONNY DESTHYA WAHYU A, S.A.P	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5	SAFIRA HERAWATI, S.Sos	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Magetan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGETAN

1. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyrakatan mempunyai tugas menetapkan kebijakan operasional serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat serta Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan, penghimpunan dan sistematisasi data informasi dalam rangka penyusunan program kegiatan penetapan kebijakan operasional bidang politik.
- Penghimpunan data keberadaan jumlah partai politik, kekuatan parpol hasil pemilu dan/atau pilkada, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik kepada parpol, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kesiswaan.
- Penyelenggaraan fasilitasi sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan partai politik dan peraturan di bidang Hak Asasi Manusia bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LANJUTAN...

- Pelaksanaan identifikasi kegiatan partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik, penyelenggara pemilu dan lembaga legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan sistem politik.
- Pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan partai politik hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
- Pelaksanaan fasilitasi, mediasi, komunikasi kegiatan partai politik, organisasi masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi siswa tentang pelaksanaan program organisasi dan hubungan dengan pemerintah
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi siswa.
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengawasan dalam kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.